

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator krusial untuk menilai sejauh mana wilayah mampu membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri. PAD terdiri dari penerimaan wilayah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal yang menjadi hak Pemerintah Daerah. Dana ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah. PAD merupakan penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan yang sah, sebagaimana dijelaskan pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Besarnya PAD mencerminkan sejauh mana wilayah tersebut mampu mengelola keuangannya secara independen dari donasi pusat (Kemenkeu,2020).

Salah satu indikator keberhasilan implementasi otonomi daerah merupakan kemandirian fiskal, yang tercermin pada kemampuan wilayah yang menghasilkan pendapatan. PAD sendiri mencerminkan sejauh mana daerah bisa membiayai kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan tanpa bergantung pada keuangan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Keberhasilan otonomi ini merupakan salah satu yang bisa di lihat dari kemampuan wilayah dalam mengoptimalkan PAD-nya (Rahman et al, 2024). Peningkatan PAD sangat bergantung pada pemanfaatan potensi ekonomi lokal dan efektivitas di pengelolaan asal dan sumber pendapatan.

Kabupaten Bantul menjadi salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mempunyai beragam potensi yang dapat menghasilkan PAD, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Sektor pariwisata, industri kreatif pertanian, dan perdagangan merupakan potensi unggulan yang bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mempertinggi kontribusi PAD. Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul (2023), donasi PAD terhadap total pendapatan daerah terus semakin tinggi berasal dari tahun ke tahun,

kecuali pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 yang menyebabkan perlambatan perekonomian secara awam.

Kabupaten Bantul memiliki beberapa upaya dalam menaikkan PAD-nya guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Berikut merupakan data PAD di wilayah Kabupaten Bantul tahun 2019 – 2023:

*Tabel 1. 1 Data PAD Kabupaten Bantul 2019-2023 (Rp)*

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD
2019	467.159.577.195,41	505.929.472.001,63
2020	420.780.615.321,87	479.610.812.119,42
2021	443.536.988.887,00	491.670.724.028,10
2022	520.854.008.396,00	540.572.423.372,80
2023	539.285.322.834,00	587.435.038.672,92

*Sumber Tabel 1. Link PPID Kabupaten Bantul*

Pajak daerah mencerminkan kewajiban setiap masyarakat di pemerintah daerah menjadi bentuk partisipasi dalam pembangunan, tanpa memberikan imbalan secara langsung. Pajak-pajak yang di pungut langsung oleh Kabupaten Bantul mencakup pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, sarang burung walet, PBB-P2, serta BPHTB. Optimalisasi penerimaan pajak memerlukan sistem pemungutan yang efektif dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak (Sari & Prabowo, 2020).

Selain itu, retribusi daerah menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Retribusi adalah pungutan atas jasa atau perizinan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. Wulandari (2021) menyatakan bahwa pengelolaan retribusi daerah yang profesional dapat memberikan sumbangan yang banyak terhadap PAD, terutama bila pelayanan yang diberikan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Tetapi, realisasi penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah pada Kabupaten Bantul belum sepenuhnya optimal. Tantangan seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya penemuan digitalisasi, dan potensi kebocoran pada pemungutan masih menjadi kendala. Nugroho dan Setiawan (2019)

menekankan pentingnya merapikan pengelolaan yang baik serta pelayanan publik yang transparan dalam meningkatkan PAD.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bantul sudah berupaya untuk melakukan terobosan yang mirip dengan digitalisasi pemungutan pajak daerah melalui sistem *e-tax*, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan edukasi perpajakan pada masyarakat. Meskipun begitu, efektivitasnya belum maksimal sehingga masih diperlukan kajian lebih lanjut terkait kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.

Adanya pertimbangan penting dalam peran PAD pada sektor pembangunan daerah dan keberlanjutan fiskal, maka penelitian ini akan mengkaji secara khusus kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap kinerja PAD pada Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2023).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauh mana pajak daerah berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bantul selama tahun 2019–2023?
2. Sejauh mana kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul selama tahun 2019–2023?
3. Strategi apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul pada selama tahun 2019–2023.
2. Menganalisis kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul pada selama tahun 2019–2023.
3. Merumuskan strategi optimalisasi pajak dan retribusi dalam rangka meningkatkan PAD.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah (khususnya BPPKAD Kabupaten Bantul) Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih efektif dan efisien, guna meningkatkan PAD secara berkelanjutan.
2. Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya peran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah, serta dampaknya terhadap peningkatan pembangunan dan pelayanan publik.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Menjadi referensi tambahan dalam pengembangan kajian ilmiah mengenai pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam konteks kontribusi pajak daerah dan retribusi terhadap PAD di tingkat kabupaten.